

# RESHUFFLE SEBAGAI KONSOLIDASI KEKUASAAN ?

**P**residen RI, Prabowo Subianto, melakukan reshuffle jilid II Kabinet Merah Putih dengan melantik 11 pejabat baru, terdiri atas menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, dan wakil kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Perubahan tersebut antara lain: Djamari Chaniago menjabat Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya dicopot. Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Afriansyah Noor kembali menempati posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer yang tersangkut kasus korupsi. Politikus PKB Farida Faricha ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi. Angga Raka Prabowo, mantan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, kini menjabat Kepala PCO. Politikus Gerindra Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaeman Umar. Selain

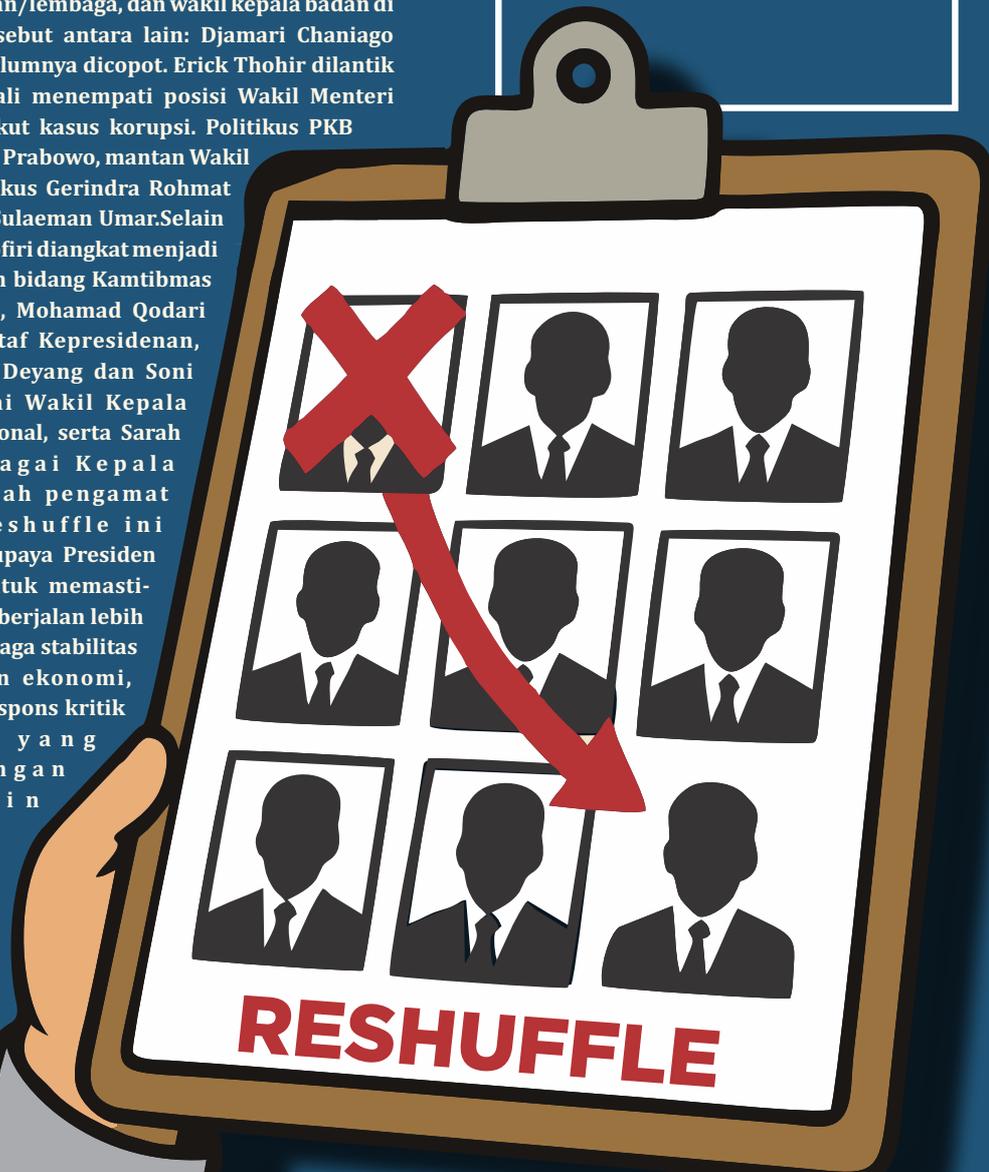
itu, Komjen (Purn) Ahmad Dofiri diangkat menjadi Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian, Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP. Sejumlah pengamat menilai reshuffle ini merupakan upaya Presiden Prabowo untuk memastikan kabinet berjalan lebih efektif, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta merespons kritik publik yang belakangan semakin menguat.

BACA HAL 11...

000

## PEJABAT YANG DILANTIK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO :

- 1. Djamari Chaniago**  
sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan
- 2. Erick Thohir**  
sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
- 3. Muhammad Qodari**  
sebagai Kepala Kantor Staf Presiden
- 4. Ahmad Dofiri**  
sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri
- 5. Angga Raka Prabowo**  
sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
- 6. Afriansyah Noor**  
sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
- 7. Rohmat Marzuki**  
sebagai Wakil Menteri Kehutanan
- 8. Farida Faricha**  
sebagai Wakil Menteri Koperasi
- 9. Naniek S. Dayang**  
sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
- 10. Sonny Sanjaya**  
sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
- 11. Sarah Sadiqa**  
sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



# PENEMPATAN RP 200 T DI LIMA BANK PERKUAT INJEKSI LIKUIDITAS

Bank Indonesia (BI) menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank umum mitra. Kebijakan tersebut dinilai semakin memperkuat injeksi likuiditas yang sudah dilakukan bank sentral.

**K**ami juga menyambut baik Pak Menteri Keuangan yang memindahkan dana dari Bank Indonesia ke likuiditas perbankan. Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia mengatakan Bank Indonesia terus melakukan ekspansi likuiditas moneter salah satunya melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025.

Selain itu, bank sentral membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 September 2025 mencapai Rp217,10 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

Bank Indonesia juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan total Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025.

Dia juga mengatakan bahwa langkah Purbaya ini memperkuat kebijakan pro growth BI yang sudah dilakukan sebelum menteri keuangan pengganti Sri Mulyani itu dilantik.

Misalnya, BI kata dia sudah lima kali memangkas suku bunga acuan BI Rate sejak September 2024, dan menjadi yang keenam kalinya setelah BI Rate kembali diturunkan pada September 2025 menjadi sebesar 4,75%.

"Jadi semua kebijakan kami di Bank Indonesia memang telah all out untuk pro growth dengan tetap menjaga stabilitas," paparnya.

"Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan moneter yang prudent dan terukur. Inflasi redah, rupiah stabil dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu," tegas Perry.

Lebih lanjut Perry mengatakan bank sentral juga menyambut baik paket ekonomi yang belum lama ini diumumkan pemerintah, terdiri dari



delapan program akselerasi pada 2025, empat program dilanjutkan pada 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

"Kami menyambut baik program-program paket pemerintah yang baru saja diumumkan, termasuk rencana ekspansi kebijakan fiskal, sehingga itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil dan meningkatkan dunia usaha, serta ujungnya akan juga mendorong permintaan kredit," kata Perry.

Pada Jumat (12/9/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah menempatkan dana total senilai Rp200 triliun di lima bank umum mitra. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia.

Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Penempatan uang negara kepada

bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, tidak ada tenor untuk penempatan dana pemerintah di lima bank tersebut.

Sementara itu, tingkat bunga atau imbal hasil yang dikenakan yakni sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan BI atau BI-Rate.

Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli SBN.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank anggota

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku sejak 12 September 2025. Dari jumlah itu, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia Rp10 triliun.

Langkah tersebut dinilai mampu memacu kredit perbankan. Sebab

pada sektor itu perlu tumbuh double digit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional konsisten di 5 persen. Sebab, pertumbuhan kredit, khususnya di sektor produktif, memiliki peran vital dalam menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Untuk mencapai pertumbuhan (ekonomi) katakan 5 persen, itu paling tidak kita harus mencapai pertumbuhan kredit sebesar double digit. Nah, ini adalah salah satu upaya kita dari waktu ke waktu, tentu saja dalam kondisi apa pun ya Pak, termasuk juga pada waktu kita menghadapi masalah Covid-19 dan lain sebagainya untuk tetap berusaha untuk bagaimana meningkatkan pemberian kredit itu secara lebih optimal," ujar Kepala Eksekutif Perangas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/9/2026).

Meski demikian, per Agustus 2025, kredit perbankan masih tercatat tumbuh 7,56 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan Juli 2025 yang sebesar 7,03 persen (yoy).

Menurut Dian, peningkatan ini positif, namun masih perlu didorong lebih kuat agar bisa menopang target pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Komisi XI DPR RI menyarankan agar dana tersebut diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk UMKM. Khusus untuk sektor UMKM, Dian menanggapi akan menjadi pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

Adapun OJK sebelumnya juga sudah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, yang mengamanatkan perluasan akses pembiayaan kepada UMKM.

Aturan ini mendorong bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) menghadirkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan tiap segmen usaha, mulai dari mikro dan ultra mikro yang membutuhkan akses cepat dan sederhana, hingga usaha kecil dan menengah yang memerlukan layanan lebih kompleks. (han,ant,ist/lut)

**“**

**Kami juga menyambut baik Pak Menteri Keuangan yang memindahkan dana dari Bank Indonesia ke likuiditas perbankan. Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan,”**

**Perry Warjiyo**  
Gubernur BI

**”**

# ADA RIBUAN DAPUR MBG FIKTIF, DPR PERTANYAKAN MEKANISME VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti temuan sekitar 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, pertanyakan mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.

**T**erkait dengan verifikasi dan pengawasan lapangan tersebut, maka Nurhadi mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapurnya tetapi sudah tercatat. "Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari?" tukas Nurhadi, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana public. Dia mencontohkan adanya temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independent.

Untuk itu, anggota Komisi Kesehatan DPR itu mendesak BGN segera mempublikasikan data rinci terkait titik lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional seluruh SPPG. Nurhadi juga meminta BGN memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan paralel sejak proses pengajuan, bukan setelah masalah mencuat.

"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.

Terkait adanya dapur SPPG fiktif ini, dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan. "Meminta BPK melakukan audit kinerja dan keuangan, tidak sekadar menilai laporan administratif. Jika terbukti ada penyimpangan, negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat," ujar Nurhadi.

Nurhadi mengatakan, program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Menurutnya, setiap keterlambatan pembangunan dapur mengakibatkan keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah," terangnya.

Kendati ditemukan ribuan dapur fiktif, ia meminta agar persoalan ini tak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak. "Angka ini memicu



Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. (Antara)

dugaan adanya 'dapur fiktif', meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat," kata Nurhadi dilansir okezone.

Diketahui, temuan dapur fiktif ini terungkap saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025). Temuan ini disebut muncul ketika BGN melakukan pemulihan pada sistemnya. Hasilnya, ada 5.000 unit dapur MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.

Salah satu contohnya adalah dapur MBG di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.

Bahkan, sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra BGN, namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana.

Nurhadi mengatakan, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, BGN mengungkapkan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan, di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga mengetahui detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.

"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu cara daftarnya, dan menggunakan yayasannya sendiri. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia tidak membangun dapurnya, dan saat mendekati 45 hari, titik itu dijual dan ditawarkan ke investor," paparnya.

Nurhadi menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele. Sebab, program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah. "Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," tegasnya.

"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," lanjut Nurhadi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dalam keterangan pada 12 Agustus 2025 lalu membantah temuan dapur makan bergizi gratis fiktif di sejumlah lokasi Jawa Barat. Dia menjelaskan bahwa titik-titik yang disebut dalam temuan itu belum ada dapur makan bergizi gratis, merupakan lokasi yang akan dijadikan SPPG. Namun, para mitra badan gizi itu belum membangunnya.

"Jadi bukan fiktif. Ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan," katanya dilansir Tempo Rabu (12/8/2025).

Sebelumnya Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis atau FMMSG Jawa Barat menemukan sejumlah lokasi dapur fiktif. Lokasi itu merujuk ke data pendaftaran dapur penyedia makan bergizi di portal resmi BGN. Namun, ketika dicek lapangan, banyak titik dapur belum dibangun.

Sehingga ada fenomena ketidakselarasan antara data administrasi dan realisasi program di

lapangan. FMMSG mengungkap banyak lokasi dapur dan SPPG yang sudah masuk dalam tahap persiapan pembangunan atau renovasi justru mengalami stagnasi tanpa aktivitas nyata.

Pada hal ini, penyedia dapur diwajibkan untuk mulai membangun atau merenovasi fasilitas agar dapat segera beroperasi dan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

Dadan mengatakan, untuk kepentingan administrasi awal, calon mitra diminta untuk menuliskan rencana lokasi yang akan dijadikan dapur. Sejumlah lokasi itu kemudian masuk ke dalam daftar mitra SPPG.

Dadan mengatakan mereka sudah menyebar 14 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengecek sejumlah lokasi itu. "Kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum," kata dia. (han,ist/lut)



**Meminta BPK melakukan audit kinerja dan keuangan, tidak sekadar menilai laporan administratif. Jika terbukti ada penyimpangan, negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat,**

**Nurhadi**

Anggota Komisi IX DPR RI



Asosiasi pengemudi ojek daring (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (CNBC)

# OJOL BEDA SUARA SAAT GEBER AKSI DI JAKARTA

**Pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Namun mereka tampaknya beda suara. Sebab selain masih banyak pengemudi yang 'onbid', Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC) menilai massa Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) yang demo di depan DPR, Istana Kepresidenan, hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak sepenuhnya pengemudi ojol.**

setengah hari. "Kami juga dari (driver) reguler merasa dari Argo Goceng itu merugikan, makanya rata-rata pada kesel juga," kata Abim (24), driver ojol reguler.

Di sisi lain, ada pula pengemudi yang memilih tetap bekerja karena alasan ekonomi maupun skeptisisme terhadap efektivitas aksi. "Dari dulu sudah sering ada demo ojol, tuntutannya mirip-mirip. Tapi realisasinya belum kelihatan jelas. Jadi saya pribadi lebih baik kerja saja," ujar Budi (41), pengemudi ojol di Gambir.

Nugroho (47), pengemudi di wilayah Senen, menilai pemerintah jarang menindaklanjuti aspirasi dengan serius. "Harapannya sih pemerintah dengar, tapi kalau lihat pengalaman, kayaknya enggak ada

tindak lanjut serius," katanya.

Sementara itu, Roni (28), pengemudi ojol lainnya, bahkan mengaku tidak merasa terwakili oleh organisasi pengagas aksi. "Sudah sering ada demo, tapi ujung-ujungnya begitu lagi," ucapnya.

Media asing menyorot rencana aksi besar pekerja transportasi daring atau ojek online (ojol) di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Channel News Asia (CNA) melaporkan ribuan pengemudi ojek online bakal turun ke jalan menuntut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dicopot dari jabatannya.

"Sekitar 2.000 hingga 5.000 pengguna transportasi daring, yang merupakan bagian dari setidaknya dua kelompok pekerja lepas, diperkirakan akan hadir dalam unjuk rasa yang juga bertujuan menuntut pembentukan undang-undang yang akan melindungi kepentingan mereka di negara dengan ekonomi terbesar di

Asia Tenggara ini," demikian laporan media tersebut.

Dikutip Ketua Garda, asosiasi pengguna transportasi daring, Raden Igun Wicaksono. Ia mengatakan ribuan ojol akan berunjuk rasa di depan DPR, Istana Kepresidenan, hingga Kementerian Perhubungan.

"Kementerian Perhubungan tidak pernah berdiskusi dengan kami untuk mendengarkan tuntutan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan penggantian Menteri Perhubungan," ujarnya kepada CNA.

Menurut Igun, aksi ini merupakan demonstrasi besar pertama sejak Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet dan mencopot lima menteri pekan lalu. Namun, Garda menilai langkah itu belum cukup karena Menteri Perhubungan tetap dipertahankan. (wid,cna,rls/dya)

**B**ertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), pengemudi atau driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berencana untuk menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (17/9/2025).

Namun ternyata tidak semua pengemudi ojol ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Salah satu asosiasi ojol yang tidak ikut di antaranya Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC). Mereka mengaku yang ikut aksi unjuk rasa adalah yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) yang menurutnya tidak sepenuhnya pengemudi ojol.

"Mereka bukan murni ojol sejati, seperti kita URC," ujar Ketua Komunitas Ojek Online URC, Hasanah.

Mansyur mengatakan anggotanya ada sekitar 2.000 pengemudi ojol. Namun dirinya memastikan semua tidak ikut dalam barisan aksi.

"Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi," tegasnya.

Meski begitu, Mansyur tetap menghargai semangat rekan-rekan driver lain yang memilih turun ke jalan.

Sebagian pengemudi juga memilih jalan tengah dengan meliburkan diri

## DPR Sepakat RUU Transportasi Online Dibahas di Prolegnas

**KETUA** Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Raden Igun mengungkap isi pertemuannya dengan sejumlah pimpinan DPR RI pada Rabu (17/9/2025). Pertemuan itu digelar untuk menerima aspirasi dari 10 perwakilan pengemudi ojek online yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Beberapa pimpinan DPR yang turut hadir meliputi Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Kemudian, turut hadir pula Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, serta beberapa perwakilan Komisi XII DPR RI.

Dari pertemuan itu, Igun menyebut DPR RI siap mengakomodir tuntutan ojol untuk memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025-2026. "Tuntutan yang pertama adalah rancangan undang-undang transportasi online. Nah itu diakomodir oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi V," kata Igun kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

Untuk mengisi kekosongan

selama masa pembuatan RUU, DPR disebut akan membuat draf Peraturan Presiden (Perpres) yang isinya mengakomodir tuntutan RUU Transportasi Online. Namun, Igun tak menyebutkan detail mengenai kapan Perpres itu akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Informasi yang kami terima Bapak Presiden akan ke luar negeri dulu, mungkin apakah sebelum berangkat ke luar negeri atau sesudahnya, itu akan ditandatangani," kata Igun.

Meski begitu, DPR RI disebut menjanjikan bahwa Perpres tersebut akan berlaku langsung setelah diteken oleh Presiden. Perpres itu nantinya akan memuat mengenai perubahan potongan tarif antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

"Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90% dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%," jelas Igun.

Lebih lanjut, Igun menyatakan

### Tuntutan lengkap aksi ojol 17 September

- Masukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025-2026.
- Potongan aplikasi maksimal 10%.
- Atur tarif pengantaran barang & makanan.
- Audit potongan 5% aplikasi.
- Hapus fitur merugikan (aceng, multi order, slot, member berbayar).
- Copot Menhub Dudy Purwagandhi.
- Usut tragedi 28 Agustus yang tewaskan dua driver.



bahwa pemenuhan tuntutan soal RUU Transportasi Online ini adalah kemenangan bagi ojol di seluruh Indonesia. "Ini yang jelas kemenangan bagi kita, enggak cuma buat yang ikut demo hari ini. Tapi untuk semua ojol di Indonesia," kata dia. (wid,ist,rls/dya)

# MK TOLAK 4 GUGATAN UU TNI, TERSISA 1 PERKARA LAGI

Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima empat gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34/2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). MK menyatakan para pemohon dari empat perkara itu tidak memiliki kedudukan hukum.

**S**idang putusan digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2025). MK mengatakan para pemohon di empat perkara itu tak pernah aktif mengikuti proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025. Hal itu membuat MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

"Tidak ada bukti dan fakta persidangan yang memperlihatkan bahwa para pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan UU 3 Tahun 2025 sejak awal," ujar hakim MK Enny Nurbaningsih.

"Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan para pemohon dalam perkara-perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum," sambung Enny.

Atas dasar itu, MK menyatakan tidak menerima empat gugatan terhadap UU TNI, sehingga tersisa satu lagi gugatan UU TNI.

"Tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Suhartoyo.

Kini, tersisa satu gugatan UU TNI. Gugatan yang putusannya belum dibacakan itu teregister dengan nomor perkara 81/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Muhammad Isnur (perwakilan YLBHI)

Inti gugatan yang diajukan Isnur itu sama dengan empat gugatan yang telah tidak diterima. Mereka meminta MK membatalkan UU Nomor 3 Tahun 2025. Para pemohon meminta MK memutuskan agar UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 berlaku lagi sepenuhnya.

Selain putusan gugatan terhadap UU TNI, MK juga akan membacakan putusan terhadap 18 gugatan UU lainnya. Antara lain, gugatan terhadap UU Kejaksaan, UU Polri, UU Kementerian Negara, UU Pokok Agraria, hingga UU Pemilu.

## 4 Hakim Dissenting Opinion

Putusan Mahkamah Konstitusi

(MK) atas uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia berakhir dengan perbedaan pandangan atau dissenting opinion. Dari sembilan hakim konstitusi, lima hakim menyatakan permohonan harus ditolak, sementara empat hakim lainnya menyampaikan dissenting opinion.

Hakim yang menolak uji formil adalah Anwar Usman, Guntur Hamzah, Daniel Yusmic Foekh, Arief Hidayat, dan Ridwan Mansyur. Mereka menilai

## Dinilai Sebagai Kemunduran Serius Demokrasi

**PUTUSAN** Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh dalil uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka menilai putusan tersebut merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Gina Sabrina menjelaskan keputusan MK ini berbahaya karena bisa menjadi pembenaran bagi praktik buruk dalam pembentukan undang-undang.

"Saya pikir ini menjadi preseden yang paling buruk dan ini menjadi akhir daripada Mahkamah Konstitusi. Karena bisa dijadikan praktik-praktik lancung tadi yang sudah dilakukan, praktik tokenisme di mana mengundang sebagian orang lalu kemudian semuanya dianggap tahu, itu akan dibenarkan untuk



Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mengangkat poster saat mengikuti aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (17/9/2025). (ist)

proses legislasi UU TNI telah sesuai konstitusi serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta hakim Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani berpandangan lain. Menurut mereka, terdapat cacat prosedural dalam proses penyusunan UU tersebut, khususnya terkait asas keterbukaan dan partisipasi publik.

Suhartoyo menilai masyarakat tidak mendapat akses memadai terhadap naskah akademik dan draf RUU. Beberapa rapat pembahasan juga dinilai berlangsung tertutup. Hal itu dianggap menghambat hak publik untuk memberi masukan sebagaimana diamanatkan UU No 12/2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Ia menegaskan, alasan pemerintah dan DPR yang menyatakan penyebarluasan dokumen terbatas karena faktor strategis tidak bisa diterima. Menurutnya, pembatasan itu justru melanggar asas keterbukaan. Suhartoyo mendorong agar UU No 3/2025 tetap berlaku, namun dinyatakan "konstitusional bersyarat" dengan kewajiban perbaikan dalam dua tahun. (wid,ist,ant/dya)

## EMPAT PERMOHONAN YANG TAK DITERIMA MK

1. Perkara nomor 75/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Muhammad Imam Maulana
2. Perkara nomor 69/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Fadhil Wirdiyana Ihsan
3. Perkara nomor 56/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Muhammad Bagir Shadr
4. Perkara nomor 45/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Kelvin Oktariano.



berbeda.

"Mahkamah Konstitusi menyatakan dokumen legislasi seperti RUU, naskah akademik, hingga daftar inventarisasi masalah itu bisa diakses di website DPR. Padahal sebetulnya, itu baru bisa diakses dua sampai tiga bulan setelah pengundangan. Setidaknya 56 hari pasca disahkan belum bisa diakses sama sekali," jelas Andrie.

Ia menegaskan bahwa koalisi masyarakat sipil telah meminta dokumen resmi sejak awal untuk mengawal reformasi TNI secara serius, namun hal itu tak pernah didapatkan dari DPR. (wid,rls, med/dya)

# TAK SEIMBANG, ANGGARAN PEGAWAI PEMKOT MALANG NAIK SAAT BELANJA DAERAH TURUN

**MALANG** - Anggaran belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, diproyeksikan naik Rp177 miliar. Sementara belanja daerah justru diproyeksi turun hingga Rp400 miliar.

Kondisi ini mendorong Pemkot Malang dan DPRD melakukan harmonisasi bersama untuk mencari titik keseimbangan dalam penyusunan anggaran.

"Ya, itu memang ada tanggapan dari beberapa fraksi terkait hal itu. Nanti kami tindaklanjuti. Karena ini juga masih proses kedua dari penyampaian Wali Kota kemarin. Setelah ini kan masih ada hearing lagi, nanti kami harmonisasikan di situ," ujar Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, Rabu (17/9/2025).

Menurut Ali, pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan dilakukan secara lebih detail dan rigid. Masukan dari dewan nantinya akan menjadi bahan koreksi bersama. Agar penyusunan anggaran dapat sesuai dengan aturan yang

berlaku sekaligus kebutuhan daerah.

Kenaikan belanja pegawai, disebut Ali dipicu oleh pengangkatan lebih dari 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menuturkan, pengangkatan ini dilakukan sebelum adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga menimbulkan perbedaan signifikan dalam proyeksi anggaran.

"Sehingga hitungan di sebelumnya mungkin masih cukup, tetapi sekarang ada kebijakan baru. Istilahnya jomplang, lah," jelasnya.

Meski dalam rancangan belanja pegawai naik hingga Rp177 miliar, Ali menyebut jumlah tersebut masih bisa berubah. "Nah belanja pegawai ini kan bukan hanya terkait gaji pokok, tetapi juga lain-lain. Tentu masih ada peluang-peluang. Tergantung nanti bagaimana kita menemukan jalan tengah bersama dewan," tegasnya.

Sementara itu, turunnya belanja daerah dinilai akan berdampak pada pengurangan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana belanja infrastruktur dan sarana-prasarana (sarpras) juga termasuk

dalam penyesuaian.

Ali menegaskan, detail pembagian anggaran baru akan dirumuskan lebih rinci bersama Banggar DPRD. "Kalau di KUA-PPAS ini kan masih umum, ya. Detailnya nanti akan kami rigidkan dengan Banggar," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menilai lonjakan belanja pegawai memang tidak bisa dihindari seiring dengan pengangkatan PPPK. Ia bahkan menyebut besarnya kebutuhan anggaran dapat dihitung dari gaji rata-rata yang harus ditanggung daerah.

"Kalau hitung-hitungan saja, kalau mereka bergaji Rp3 juta dikali 14 kali, sudah Rp42 juta. Dikali 3.000 sudah hampir Rp130 miliar, itu belum bicara hak mereka yang dapat tunjangan

kinerja," jelas Trio.

Namun, DPRD menyoroti besarnya rasio belanja pegawai dalam rancangan KUA-PPAS. Trio menyebut angkanya mencapai hampir 47 persen, jauh di atas batas 30 persen sebagaimana dimatangkan undang-undang. (Santi/Dya)



Paripurna penyampaian pandangan umum (PU) Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, Rabu (17/9/2025). (Santi/Lentera)

## DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALANG: SURPLUS BERAS CAPAI 58 RIBU TON



Ilustrasi: Ketersediaan beras di gudang Bulog Malang. (Santi/Lentera)

242.714,08 ton. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat yang tercatat 184.161,90 ton.

"Surplus ini menjadikan stok beras di Kabupaten Malang cukup aman sampai akhir tahun," ujarnya, dikutip pada Rabu (17/9/2025).

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, ini menjelaskan, total produksi beras di Kabupaten Malang tahun ini sebenarnya mencapai 276.145,84 ton berdasarkan perhitungan

awal.

Namun setelah dikurangi susut panen, kebutuhan benih, dan faktor teknis lainnya, produksi bersih yang siap dikonsumsi masyarakat hanya 177.009 ton. Jumlah tersebut kemudian ditambah stok cadangan sebesar 65.704,60 ton yang tersisa dari tahun 2024 lalu.

"Kalau mengacu pada data kotor, memang terlihat lebih besar. Tetapi yang bisa dipakai adalah produksi bersihnya. Dan dengan kebutuhan masyarakat, kami masih memiliki surplus hingga 58 ribu ton," terangnya.

Menurut Mahila, capaian tersebut menunjukkan ketahanan pangan Kabupaten Malang berada dalam kondisi aman. Pemerintah daerah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras hingga penghujung tahun.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat pada 2024 luas panen padi mencapai 41.020 hektare, dengan total produksi 254.794 ton gabah kering giling (GKG). Setelah dikonversi, produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada tahun tersebut mencapai 147.123 ton.

Selain beras, Mahila juga menyinggung kondisi jagung di Kabupaten Malang. Dikatakannya, produksi bersih jagung sepanjang 2025 mencapai 153.318 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya 96.940,69 ton.

"Kalau dihitung, surplus jagung

kita mencapai 56.377,11 ton. Luas lahan jagung di Kabupaten Malang mencapai 32.875 hektare, dengan produktivitas rata-rata 63,89 kuintal per hektare," paparnya.

Produksi kotor jagung, menurutnya, mencapai 210.035 ton. Namun setelah dikurangi faktor susut dan kebutuhan benih, jumlah produksi bersih yang tersedia 153.318 ton.

"Bedanya jagung tidak memiliki stok cadangan. Kalau beras masih ada stok yang bisa dipakai, sementara jagung tidak ada stok sama sekali. Tetapi secara produktivitas, jagung di Kabupaten Malang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Malang, M. Nurjuliansyah Rahman, juga memastikan ketersediaan beras di gudang Bulog Malang mencukupi hingga akhir tahun. Ia menyebut total stok saat ini mencapai 68 ribu ton, yang tersebar di empat gudang wilayah Malang.

"Kalau ditanya sampai kapan stok mencukupi, bisa dibilang sampai panen tahun depan. Untuk akhir tahun 2025 ini, stok beras lebih dari cukup," ungkapnya. (Santi/Dya)

# DEMO MENULAR: EKUADOR BUNTUT SUBSIDI DICABUT, TIMOR LESTE DIPICU MOBIL DINAS DEWAN

Gelombang unjuk rasa tengah melanda sejumlah negara dengan isu berbeda namun bernuansa serupa dengan kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Di Ekuador, pencabutan subsidi bahan bakar memicu demonstrasi besar yang berujung ricuh. Sementara di Timor Leste, protes bermula dari rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota parlemen yang dianggap membebani anggaran negara. Fenomena ini menunjukkan bagaimana keresahan publik dapat menular lintas batas ketika dipicu ketidakpuasan terhadap pengelolaan kebijakan publik.

**U**njuk rasa berlangsung di Dili, Timor Leste, dengan lebih dari seribu warga memadati jalanan di sekitar Parlemen Nasional. Mereka menolak rencana pengadaan mobil dinas untuk 65 anggota parlemen yang telah disetujui sejak tahun lalu.

Aksi protes yang semula berlangsung tertib berubah menjadi ricuh setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata. Kericuhan dipicu oleh sebagian demonstran yang melempari gedung parlemen dengan batu dan merusak beberapa kendaraan.

Dikutip dari AFP, Senin (15/9/2025), rencana itu menjadi pemicu kemarahan warga yang lebih dari 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Dunia.

"Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian (Toyota) Prado demi perbaikan diri," kata mahasiswa dari Universidade da Paz, Leonito Carvalho.

"Jika tidak, kami akan tetap berada di sini," lanjutnya.

Beberapa partai politik Timor Leste, termasuk CNRT, Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putri Timor, menyatakan akan meminta parlemen membatalkan rencana pembelian mobil dinas karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Timor Leste (XEMGFA), Letjen Domingos Raul "Falur" Rate Laek, meminta demonstran tidak membakar rumah atau merusak fasilitas publik.

"Demonstrasi adalah hal yang

Masyarakat berpartisipasi dalam protes yang diserukan oleh kelompok masyarakat adat, pedesaan, dan perkotaan terhadap proyek pertambangan Loma Larga milik Dundee Precious Metals dan menuntut perlindungan perairan setempat, di Cuenca, Ekuador, Selasa (16/9/2025). (Foto: Reuters)



biasa, hanya saja harus dilakukan secara damai. Jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan kerusuhan, dan jangan lagi membakar rumah," katanya.

Demonstran membawa spanduk yang dengan nada desakan. Mereka juga membakar ban dan sebuah kendaraan pemerintah dekat gedung parlemen.

"Stop pencurian, stop koruptor," tulis spanduk itu.

Saat ini, Timor Leste tengah berjuang menghadapi tingkat ketimpangan yang tinggi, kekurangan gizi, pengangguran, dan masih sangat bergantung pada minyak dengan sedikit diversifikasi ke sektor lain.

Timor Leste merdeka dari Indonesia pada 2002 setelah menjadi salah satu provinsi selama 24 tahun.

Sementara itu, pada Selasa (16/9/2025), aksi damai di Dili berubah ricuh setelah demonstran melempar batu ke arah polisi, yang

kemudian membalas dengan gas air mata. Insiden ini menyebabkan empat orang terluka dan mendapat perawatan medis. Polisi menyatakan akan memanggil koordinator aksi untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi.

Selain itu, demonstrasi ini sudah masuk hari kedua. Mahasiswa tetap teguh pada pendiriannya, akan terus berdemo sampai pembelian mobil dinas benar-benar dibatalkan.

"Kami ingin keputusan membeli mobil dinas dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh Ketua Parlemen Nasional," kata aktivis, Domingos de Andrade (34), kepada wartawan.

"Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil dinas," lanjutnya.

Demonstran membawa spanduk yang dengan nada desakan. Mereka juga membakar ban dan sebuah kendaraan pemerintah dekat gedung parlemen.

"Stop pencurian, stop koruptor," tulis spanduk itu.

Per hari ini, pemerintah Timor Leste belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait aksi demo.

## Equador Membara

Presiden Ekuador, Daniel Noboa, memberlakukan status darurat pada Selasa (16/9/2025) di tujuh provinsi. Tindakan ini diambil menyusul banyaknya gelombang aksi demo menolak penghapusan subsidi BBM.

Berdasarkan pemberitaan outlet media Barron's yang dilansir AFP,

Rabu (17/9/2025), aksi demonstrasi ini bermula saat Noboa mengumumkan pemotongan subsidi BBM pekan lalu sebagai upaya penghematan uang negara hingga US\$ 1,1 miliar atau Rp 18,06 triliun (kurs Rp 16.427 per dolar AS). Kala itu Noboa mengklaim dana tersebut akan dialihkan ke program bantuan sosial dan dukungan untuk sektor pertanian. Namun ternyata kebijakan ini langsung berdampak pada kenaikan harga solar dari US\$ 1,80 (Rp 29.568) menjadi US\$ 2,80 (Rp 45.995) per galon.

Kenaikan harga BBM ini sangat menekan masyarakat, mengingat hampir sepertiga penduduk Ekuador hidup dalam kemiskinan. Ini menjadi pemicu massa untuk protes sejak awal pekan.

Hingga Selasa (16/9/2025) kemarin, para pengunjuk rasa memblokir jalan raya Pan-American Utara di luar ibu kota Quito dengan batu, menyusul aksi blokade di beberapa jalan yang sudah dilakukan oleh massa pengemudi truk di hari sebelumnya.

"Blokade tersebut telah menyebabkan komplikasi dalam rantai pasokan pangan dan berdampak pada pergerakan masyarakat, melumpuhkan berbagai sektor ekonomi," kata pemerintah Ekuador dalam sebuah pernyataan.

Untuk diketahui, upaya penghentian subsidi BBM ini bukan yang pertama dilakukan oleh pemerintah Ekuador. Dua presiden sebelum Noboa juga sempat mengusulkan menghapus subsidi BBM yang sangat menguras APBN.

Namun kebijakan tersebut langsung disambut dengan aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan, membuat upaya pencabutan subsidi ini berakhir begitu saja. Demonstrasi ini dipelopori oleh kelompok Adat Conaie, yang sebelumnya berhasil menggulingkan tiga pemimpin Ekuador antara tahun 1997 dan 2005.

"Pemotongan subsidi paling merugikan masyarakat miskin," kata kelompok Conaie dalam sebuah pernyataan. Namun hingga kini kelompok tersebut belum secara resmi bergabung dengan gerakan protes terbaru. (AFP, CNN, Reuters, ABC News, ist/nei)

Mahasiswa dari beberapa universitas memprotes rencana DPR untuk membeli 65 SUV bagi anggota DPR di sebuah jalan, Dili, Timor Leste, Senin (15/9/2025). (Foto: AFP)



# Jangan Asal Konsumsi, Minyak Ikan Bisa Picu Masalah Jantung

**S**uplemen minyak ikan kerap dipasarkan sebagai penunjang kesehatan jantung karena kandungan omega-3 yang dianggap bermanfaat. Namun, riset terbaru dari British Heart Foundation yang dipublikasikan di BMJ Medicine mengungkap bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya tepat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Hasil penelitian menunjukkan, konsumsi minyak ikan justru dapat meningkatkan risiko stroke dan fibrilasi atrium pada orang sehat.

Riset itu menemukan bahwa orang tanpa riwayat penyakit kardiovaskular yang rutin mengonsumsi suplemen minyak ikan memiliki risiko 13% lebih besar mengalami fibrilasi atrium dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Fibrilasi atrium sendiri merupakan gangguan irama jantung yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti stroke. Sebaliknya, pada individu dengan kondisi jantung, minyak ikan justru memberi manfaat, yakni menurunkan risiko serangan jantung sekaligus meningkatkan peluang bertahan hidup.

Sementara itu penemuan ini menyoroiti perlunya pendekatan yang lebih personal dalam konsumsi suplemen. Meskipun omega-3 memiliki manfaat yang sudah dikenal untuk kesehatan otak dan jantung, mengandalkan suplemen tidak selalu menjadi pilihan paling aman bagi individu yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan riwayat kesehatan individu, gaya hidup, serta panduan medis ketika memutuskan untuk menggunakan suplemen. Sebelum memutuskan untuk mulai mengonsumsi suplemen minyak ikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

## Periksa Status Kesehatan

Mengetahui kondisi kesehatan pribadi, termasuk adanya penyakit jantung atau faktor risiko lainnya, merupakan hal yang sangat penting sebelum mengonsumsi suplemen. Setiap orang memiliki kebutuhan tubuh yang berbeda, sehingga tidak semua suplemen aman atau memberikan manfaat yang sama.

Untuk itu, sebaiknya selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum

memutuskan penggunaan suplemen. Dengan arahan medis yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa suplemen yang dikonsumsi benar-benar sesuai dan mendukung kesehatan secara optimal.

## Ketahui Dosis dan Kemurnian

Saat mempertimbangkan konsumsi suplemen, penting untuk memilih produk dengan kualitas tinggi serta dosis yang sesuai kebutuhan tubuh. Tidak semua suplemen yang beredar di pasaran memiliki standar yang sama, sehingga ketelitian dalam memilih menjadi hal utama untuk menghindari risiko efek samping atau kandungan yang tidak jelas. Membaca label dengan cermat dapat membantu Anda mengetahui kandungan aktif, dosis, serta bahan tambahan yang ada di dalamnya. Selain itu, pastikan produk yang dipilih sudah melalui uji kualitas, mendapat sertifikasi dari lembaga terpercaya, atau direkomendasikan oleh tenaga medis. Dengan begitu, manfaat suplemen dapat lebih terjamin, aman bagi kesehatan, dan benar-benar mendukung kebutuhan nutrisi harian Anda.

## Faktor Gaya Hidup

Suplemen minyak ikan tidak dapat menggantikan pola hidup sehat yang menyeluruh. Peran utamanya hanyalah sebagai pendukung, bukan solusi utama dalam menjaga kondisi tubuh, terutama kesehatan jantung. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, tetapkan menjalani gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

Kombinasi kebiasaan tersebut akan memberikan perlindungan lebih baik bagi kesehatan jantung Anda.

## Seimbangkan Risiko dan Manfaat

Sebelum mengonsumsi suplemen, penting untuk menilai apakah potensi risiko yang bisa muncul benar-benar sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Tidak semua orang membutuhkan suplemen, sehingga keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Dalam banyak situasi, memperoleh asupan omega-3 langsung dari makanan sehari-hari, seperti ikan berlemak, kacang-kacangan, atau biji-bijian, jauh lebih aman dan alami.

Cara ini tidak hanya meminimalkan risiko, tetapi juga memberikan tambahan nutrisi lain yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sementara itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi minyak ikan:

## Kehamilan dan Menyusui

Suplemen minyak ikan kemungkinan besar aman dikonsumsi selama kehamilan maupun masa menyusui, dan umumnya tidak memberikan dampak negatif terhadap janin atau bayi yang sedang disusui. Namun, penting untuk memperhatikan jenis ikan yang dikonsumsi secara langsung, karena tidak semua ikan memiliki kandungan yang aman.

Misalnya, hindarilah ikan todak, king mackerel, dan tilefish karena jenis ikan tersebut diketahui mengandung merkuri dalam kadar tinggi serta racun lain yang berpotensi membahayakan perkembangan sistem saraf janin maupun kesehatan ibu. Untuk jenis ikan lain yang lebih aman, sebaiknya tetap membatasi konsumsinya, yaitu tidak lebih dari 12

ons atau sekitar 340 gram per minggu, agar manfaat nutrisi seperti asam lemak omega-3 tetap bisa diperoleh tanpa meningkatkan risiko paparan zat berbahaya.

## Anak-anak

Suplemen minyak ikan aman jika diminum anak-anak. Pada remaja, minyak ikan telah digunakan dengan aman dalam dosis hingga sekitar 2,2 gram setiap hari selama 12 minggu. Namun, anak kecil sebaiknya tidak makan lebih dari dua ons ikan per minggu karena ikan berlemak mengandung racun seperti merkuri yang dapat berdampak buruk pada anak-anak.

## Efek Samping

Mengonsumsi minyak ikan tidak selalu aman bagi semua orang karena dapat menimbulkan sejumlah efek samping serius. Pada penderita bipolar, minyak ikan berpotensi memperburuk gejala yang dialami. Bagi mereka yang memiliki jaringan parut di hati akibat penyakit hati, risiko pendarahan bisa meningkat. Konsumsi dalam dosis tinggi juga dapat menyulitkan pengendalian kadar gula darah, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker pada individu dengan kondisi poliposis adenomatosa familial.

Selain itu, dosis tinggi minyak ikan dapat menurunkan respons sistem kekebalan tubuh, yang berbahaya bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah. Pada pasien dengan defibrilator implan, minyak ikan juga dapat memicu detak jantung tidak teratur.

Sementara itu, individu yang memiliki alergi terhadap makanan laut berpotensi mengalami reaksi alergi serupa terhadap suplemen minyak ikan, sehingga sebaiknya berhati-hati atau menghindarinya sama sekali. (nei,ist/dya)



# SUHU BUMI NAIK 0,27°C PER DEKADE, PEMANASAN GLOBAL KIAN PARAH

**L**aporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa laju pemanasan global kini mencapai sekitar 0,27 derajat Celsius setiap dekade. Peningkatan ini hampir 50% lebih cepat dibandingkan dengan periode 1990-an dan 2000-an yang rata-rata hanya sekitar 0,2 derajat Celsius per dekade, menegaskan bahwa kondisi pemanasan global semakin mengkhawatirkan.

Penelitian iklim yang dirilis pada Juni lalu memberi peringatan bahwa target ambisius Perjanjian Paris untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius berada di ujung kegagalan. Jika emisi terus meningkat dengan laju saat ini, suhu Bumi diperkirakan akan melampaui batas tersebut pada tahun 2028.

Percepatan pemanasan global dipicu oleh ketidakseimbangan energi di Bumi, di mana gas rumah kaca seperti karbon dioksida semakin banyak menahan panas dari Matahari. Dalam periode 2020 hingga 2024, aktivitas manusia diperkirakan telah melepaskan sekitar 200 miliar ton gas rumah kaca setara karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e) ke atmosfer.

Dampaknya, suhu permukaan dan lautan terus meningkat, memicu mencairnya es daratan dan mempercepat kenaikan permukaan laut. Sejak 1900, permukaan laut global telah naik sekitar 23 sentimeter dengan rata-rata 1,85 milimeter per tahun. Namun sejak 2000, laju itu melonjak dua kali lipat menjadi 3,7 mm per tahun, dan dalam dekade terakhir meningkat lagi menjadi 4,5 mm per tahun.

“Sayangnya, laju pemanasan global

yang belum pernah terjadi sebelumnya dan percepatan kenaikan permukaan laut memang sesuai dengan emisi gas rumah kaca yang kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah,” tulis ilmuwan iklim dari University of Leeds sekaligus penulis utama laporan, Piers Forster, dikutip Yale Climate Connections.

Meski banyak temuan mengkhawatirkan, laporan ini menyebut masih ada secercah harapan. Target utama Perjanjian Paris untuk menahan pemanasan di bawah 2 derajat Celsius dinilai masih mungkin tercapai, asalkan ada aksi cepat untuk menurunkan emisi karbon dioksida dan metana.

“Emisi di masa depan mengendalikan pemanasan di masa depan. Dan jika dunia bertindak

cepat pada emisi karbon dioksida dan metana, kita bisa mengurangi setengah laju pemanasan,” kata Forster.

Penulis lainnya, Zeke Hausfather, menambahkan meski percepatan pemanasan tampak mengkhawatirkan, tren global juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan emisi dalam 15 tahun terakhir serta biaya energi bersih yang terus menurun.

China disebut sebagai pemain kunci karena kontribusi emisinya yang besar. Namun berkat investasi masif pada teknologi energi bersih, emisi negara itu mulai sedikit menurun dalam setahun terakhir.

“Ini juga merupakan dekade ketika emisi gas rumah kaca global diperkirakan akan mencapai puncak dan mulai menurun secara signifikan,” tulis para penulis laporan tersebut. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO:** SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**MEDIA TERVERIFIKASI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Tren Gelang Tali Plat Emas Simpel tapi Mewah

**P**erhiasan berperan besar dalam menunjang penampilan wanita, khususnya untuk menghadirkan sentuhan personal yang anggun. Salah satu aksesoris yang tengah populer adalah gelang tali plat emas, yang memadukan keindahan emas dengan kenyamanan bahan tali. Gelang tali plat emas kini semakin populer berkat desainnya yang serbaguna, cocok untuk aktivitas santai hingga acara formal. Dengan variasi model dari

simpel hingga berhias permata serta harga lebih terjangkau dibanding emas murni, gelang ini menjadi pilihan tepat untuk menunjang gaya sekaligus investasi. Menentukan model gelang tali plat emas yang sesuai bisa memberi sentuhan besar pada penampilan Anda. Jadi, mana yang paling cocok untuk Anda? Berikut rekomendasi pilihan gelang tali plat emas.

## Minimalis

Gelang minimalis dari tali emas menjadi pilihan utama bagi wanita yang menghargai kesederhanaan sambil tetap ingin tampil dengan nuansa elegan. Dengan desain yang sederhana dan tanpa banyak ornamen mencolok, gelang ini sangat mudah untuk dipadupadankan dengan berbagai jenis pakaian, baik untuk acara kasual maupun semi-formal.

Umumnya, gelang ini dibuat dari emas kuning atau putih, memberikan kesan yang abadi dan cocok untuk digunakan setiap hari.

"Keunggulan utama dari gelang minimalis terletak pada fleksibilitasnya; ia dapat dikenakan sendiri untuk tampilan yang bersih dan rapi, atau dikombinasikan dengan gelang lain untuk menciptakan gaya berlapis yang lebih dinamis." Harganya yang terjangkau juga menjadikannya pilihan yang ideal bagi mereka yang ingin tampil modis tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

## Liontin Mini

Gelang dengan tali emas yang dilengkapi liontin mini menghadirkan perpaduan antara kesan manis dan romantis melalui desainnya yang sederhana tetapi tetap elegan. Biasanya, model ini menampilkan liontin yang berbentuk hati, bunga, atau simbol kecil lainnya.

Desainnya yang ringan dan nyaman membuatnya menjadi pilihan ideal bagi wanita yang ingin tampil anggun tanpa merasa terbebani. Liontin mini yang menggantung pada gelang tali ini memberikan aksen menarik dan personal, sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang menyukai perhiasan dengan makna simbolis.

Contohnya, motif bunga pada liontin bisa berupa satu bunga kecil sebagai fokus utama atau beberapa bunga yang tersusun rapi, yang

tentunya menambah kesan feminin dan lembut. Fleksibilitas dalam berpadu dengan berbagai gaya busana menjadikan gelang ini sebagai investasi yang cerdas untuk koleksi perhiasan Anda.

## Serut (Adjustable)

Gelang tali emas serut dikenal karena tingkat kenyamanan dan fleksibilitasnya yang sangat baik, sehingga menjadikannya pilihan favorit bagi wanita modern. Desain yang dapat disesuaikan memungkinkan pemakai untuk mengatur ukuran gelang sesuai dengan lingkaran pergelangan tangan mereka, sehingga memastikan kenyamanan yang optimal.

Mekanisme serut pada gelang ini berfungsi dengan cara menarik ujung tali atau benang, yang memungkinkan ukuran gelang diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan pemakai. Memastikan bahwa material tali serut memiliki kualitas baik sangatlah penting agar gelang tidak mudah rusak atau putus, sehingga dapat menjaga keawetan produk. Model gelang ini juga sangat praktis untuk dipakai dan dilepas, cocok untuk berbagai ukuran pergelangan tangan, serta tidak memberikan tekanan berlebih di satu titik, menjadikannya nyaman digunakan dalam waktu yang lama.

## Ukiran Unicorn untuk Anak

Gelang tali dengan plat emas model 2025 kini menjadi pilihan utama bagi anak-anak karena desainnya yang sederhana namun tetap manis. "Plat emas dengan ukiran unicorn memberi sentuhan lucu yang sangat disukai anak-anak," terutama ketika dipadukan dengan tali merah cerah yang membuatnya semakin mencolok saat digunakan.

Desain gelang ini sangat ringan dan tidak berlebihan, sehingga sangat cocok untuk dipakai sehari-hari maupun dalam acara-acara spesial.

Selain itu, gelang ini dirancang dengan praktis, memiliki tali yang dapat disesuaikan ukurannya, sehingga anak-anak dapat memakainya dengan nyaman tanpa khawatir akan ukuran yang longgar atau terlalu ketat.

## Ukiran Nama/Inisial

Gelang dengan tali emas yang dilengkapi plat ukiran nama atau inisial memberikan nuansa personal yang elegan dan penuh makna. Model ini menggabungkan tali yang sederhana, biasanya terbuat dari katun atau nilon, dengan sebuah plat emas tipis yang terletak di tengahnya.

Plat emas tersebut dapat memiliki berbagai bentuk, seperti persegi panjang atau lingkaran polos, yang dapat diukir dengan inisial nama, tanggal penting, atau pesan singkat lainnya. (nei,ist/dya)



## Reshuffle Sebagai ...dari hal 1

**B**erbagai pandangan terhadap reshuffle kabinet ini bergulir dari para pengamat dan peneliti. Di antaranya disampaikan peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli. Dia menilai bahwa keputusan Presiden, Prabowo Subianto, dalam reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan upaya untuk konsolidasi kekuasaan.

"Tentu saja ini bisa dikatakan sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan dan untuk memastikan agar kabinet berjalan efektif," kata Romli, Rabu (17/9/2025).

Romli menyatakan ketika melihat menteri dan pejabat yang dilantik pada reshuffle jilid I dan II merupakan mereka yang berada di lingkaran Presiden Prabowo. "Jika mencermati menteri-menteri dan pejabat yang dilantik, yang lalu dan yang sekarang, tampak jelas banyak berasal orang-orang dari Gerindra dan/atau lingkaran dekat presiden prabowo. Mereka menjabat di posisi-posisi strategis," kata Romli dikutip Media Indonesia.

Selain itu, Romli juga memberikan pandangan bahwa reshuffle kabinet dilakukan untuk melecut kinerja para Menteri. Ia menilai Presiden Prabowo ingin para menteri dapat bekerja dengan baik dan memastikan terciptanya stabilitas ekonomi dan politik. Dia berpandangan dukungan para Menteri tersebut maka pemerintahannya bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif.

"Tentunya untuk memastikan kondisi politik dan keamanan terkendali agar kejadian yang lalu tidak terulang kembali," katanya.

Meski demikian, Romli juga menilai dalam reshuffle yang dilakukan sebelumnya, Presiden Prabowo masih setengah hati. Menurutnya sebagian dari reshuffle kabinet merupakan tuntutan publik. Namun, sayangnya reshuffle tidak menasar menteri yang bermasalah.

"Sebagian dari reshuffle kabinet tersebut merupakan tuntutan publik. Namun sayang, reshuffle yang dilakukan setengah hati karena menteri yang lain yang dituntut publik tidak diganti. Padahal masih ada beberapa menteri yang bermasalah dan kinerjanya buruk tidak diganti," kata Romli Rabu (10/9/2025) lalu.

Seperti pada reshuffle terakhir ini, reshuffle yang sebelumnya juga sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan. Ia mengatakan Presiden Prabowo mengangkat sosok yang dekat dan dipercaya menggantikan mereka yang dekat dengan sosok tertentu.

Dia menyebut sosok yang dimaksud seperti mencopot Budi Gunawan yang dekat dengan PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Prabowo

juga mencopot menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo seperti Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo.

"Reshuffle kabinet ini untuk konsolidasi kekuasaan. Figur yang diangkat yang dekat dengan Kertanegara (kediaman Prabowo). Figur yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai dikurangi. Sementara figur yang dianggap dekat dengan Ibu Megawati atau PDIP juga diganti," katanya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik sekaligus Founder Nasky Milenal Center, Nasky Putra Tandjung, menilai keputusan Prabowo tepat untuk menjawab kritik publik. Menurutnya, pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi kinerja.

"Publik menilai Presiden Prabowo mendengar kritik, saran, dan aspirasi masyarakat. Ini sinyal positif bahwa pemerintah ingin mempercepat capaian program Asta Cita," kata Nasky dalam keterangannya.

Nasky menegaskan, posisi Menko Polhukam yang kini ditempati Djamar Chaniago sangat strategis untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Ia menilai Prabowo memilih figur yang bisa memperkuat stabilitas politik dan pertahanan nasional.

"Perubahan ini memang tidak mudah, tapi mereka adalah orang pilihan. Publik berharap menteri baru bisa membawa perubahan nyata, bekerja tulus untuk rakyat, dan fokus pada program pro-masyarakat, bukan sekadar kepentingan elit politik," tegas Nasky.

Ia juga meminta publik memberi ruang bagi menteri baru untuk bekerja, sembari tetap memberikan kritik konstruktif demi memperkuat kinerja kabinet.

Dengan reshuffle ini, Kabinet Merah Putih diharapkan semakin solid menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo, terutama dalam mewujudkan janji politiknya melalui program Asta Cita.

Sementara, reshuffle kali ini juga memunculkan berbagai harapan. Di antaranya harapan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, yang disampaikan Ketua umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar. Dia meyakini Erick Thohir akan mampu menghadirkan terobosan-terobosan yang diperlukan bagi olahraga Indonesia.

"Pak Erick punya segudang pengalaman di dunia olahraga, pernah menjadi Ketum Perbasi dan saat ini juga menahkodai PSSI. Di dunia internasional jug beliau tercatat di berbagai federasi olahraga," kata Michael dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).

"Saya optimis Pak Erick akan membawa terobosan-terobosan baru untuk olahraga Indonesia," kata dia.

Michael mengingatkan bahwa Erick yang menggantikan Menpora sebelumnya, Dito Ariotedjo, sama sekali bukan orang baru di dunia olahraga. Mantan presiden Inter Milan itu bahkan pernah mengemban tanggung jawab besar saat menjadi ketua pelaksana Asian Games 2018.

"Prestasi Pak ET di olahraga sangat komprehensif. Kami harap dengan pengalaman tersebut, Pak ET bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat event olahraga dunia," ujar Michael.

Dalam waktu dekat, Indonesia diberi kepercayaan oleh AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta. Dengan semakin banyak ajang olahraga penting diselenggarakan di tanah air, Michael yakin dunia pariwisata dan industri olahraga Indonesia akan semakin berkembang.

"Banyak cabang olahraga Indonesia punya potensi besar, salah satunya futsal. Kami menantikan kepemimpinan Pak ET untuk membawa dunia olahraga Indonesia naik kelas," kata Michael.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait Badan Komunikasi Pemerintah merupakan bentuk transformasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Perubahan dilakukan untuk memperbaiki komunikasi kepada publik.

"Setelah kami evaluasi, (PCO) membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, sehingga kami bentuk badan baru," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

Politikus Gerindra ini mengatakan pihak Istana memutuskan Badan Komunikasi Pemerintah tidak sekedar mewakili fungsi komunikasi dari Kantor Kepresidenan. Badan Komunikasi Pemerintah akan menyelaraskan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah terhadap seluruh program pemerintah.

Dia mengatakan posisi Badan Komunikasi Pemerintah akan dibuatkan Keputusan Presiden (keppres) yang baru. Dalam Keppres itu, tugas PCO akan dipindahkan ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah.

Selain itu, Prasetyo mengatakan tim PCO untuk sementara akan pindah ke Badan Komunikasi Pemerintah. "Untuk sementara semuanya hanya berpindah saja," kata dia dilansir tempo.

Presiden Prabowo memberhentikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Dia kemudian mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Meski memiliki jabatan baru, Angga tetap menjadi Wamenkomdigi.

Hal itu berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 96B Tahun 2025 dan Nomor 97B Tahun 2025 Tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

Sementara, terkait dengan Angga Raka Prabowo yang memegang tiga jabatan saat ini, yaitu sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Komisaris Utama (Komut) Telkom, Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana akan mengevaluasi rangkap jabatan itu dari sisi peraturan. Namun, Prasetyo tidak mendetailkan peraturan itu. "Kami evaluasi pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya," katanya.

Istana juga akan melakukan evaluasi rangkap jabatan Angga dari sisi fungsinya. Meski begitu, dia mengatakan anggota Kabinet Merah Putih yang menjabat sebagai komisaris merupakan bentuk penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Contoh misalnya Wamenkomdigi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom. Nah sekarang dengan Angga diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintahan nanti akan kami lihat bagaimana," kata Prasetyo.

Pada kesempatan terpisah, Angga mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan penugasan di bidang komunikasi sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Badan ini merupakan bentuk transformasi Kantor Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Angga mengatakan Badan Komunikasi Pemerintah bukan lembaga nonstruktural. Karena itu, Angga mengklaim tetap bisa menjadi Wamenkomdigi. "Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamenkomdigi merangkap sebagai badan komunikasi pemerintah," ujar dia.

Kemudian, terkait dengan kekosongan posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa satu dari tiga wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpeluang besar menempati jabatan pelaksana tugas menteri BUMN yang sebelumnya dijabat Erick Thohir.

"Kemungkinan dari wamen," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjawab pertanyaan seputar peluang wakil menteri (wamen) menempati kursi pelaksana tugas menteri BUMN.

Ia mengatakan posisi menteri BUMN definitif hingga saat ini belum ditunjuk setelah Erick Thohir berpindah tugas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). (han,ant,ist/lut)



# DPRD SURABAYA DORONG PENGUATAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT

## ARIF FATHONI: ANAK MUDA HARUS JADI AGENT OF TRUTH

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengisi kuliah tamu di Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa (16/9/2025). (Ist)



“

Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya.”

**ARIF FATHONI**

Wakil Ketua DPRD Surabaya,

mengerakkan massa. Literasi digital harus menjadi investasi jangka panjang agar warga tidak menjadi korban disrupsi informasi,” kata Fathoni dikutip Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, literasi digital bukan lagi sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus informasi, termasuk hoaks.

Literasi digital bertujuan memberdayakan pengguna agar bisa memilah informasi dengan kritis, membedakan fakta dan hoaks, memverifikasi sumber berita, dan berkomunikasi secara etis di ruang digital.

Sebab, tanpa literasi digital, masyarakat rentan menjadi korban penyebaran informasi palsu. Hal ini bisa memicu perpecahan dan kesalahpahaman. Sehingga literasi digital menjadi 'benteng utama' untuk menjaga ruang digital yang sehat.

Politisi yang juga mantan aktivis itu mendorong agar Pemkot

Surabaya menghidupkan kembali program literasi digital yang pernah dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Individu yang memiliki literasi digital tinggi mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga lebih mudah mengenali tanda-tanda hoaks seperti judul yang sensasional, sumber yang tidak terpercaya, atau konten yang tidak konsisten.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan komunitas pemuda, seperti Pemuda Tangguh dan Karang Taruna, untuk menjadi ujung tombak gerakan literasi.

Menurut Fathoni, penerima beasiswa Pemuda Tangguh memiliki tanggung jawab moral untuk tampil sebagai pelopor perubahan.

“Mereka adalah arek asli Suroboyo yang mestinya menjadi penyampai kebenaran di daerahnya. Dengan pembekalan kondisi objektif bangsa oleh Bakesbangpol, mereka bisa jadi agen pembaharu dalam melawan disrupsi informasi,”

tuturnya.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menyinggung teori hegemoni Antonio Gramsci yang menekankan lahirnya “intelektual organik” untuk melawan dominasi wacana.

Intelektual organik muncul dari kelas sosial tertentu (misalnya, penerima beasiswa Pemuda Tangguh) untuk mewakili dan mempromosikan kepentingan literasi digital. Mereka bertugas mengorganisir masyarakat, memberikan pandangan dunia baru, dan menginisiasi kesatuan antar-kelompok.

### Disinggung Peran Aktif Bakesbangpol

Dalam konteks ini, ia menilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya juga harus mengambil peran lebih aktif. “Sejauh ini nyaris tidak ada singgungan apa pun dengan generasi muda. Padahal zaman terus bergerak, kegiatan Bakesbangpol juga harus adaptif dengan kondisi geopolitik global,” jelasnya.

Selain terus menghidupkan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang ada di balai RW, ia juga mengusulkan agar literasi dihidupkan melalui perpustakaan dengan konsep humanis. Fasilitas ramah keluarga, dan menyatu dengan alam di kawasan timur Surabaya.

“Bayangkan sebuah ruang di mana anak-anak bisa bermain, sementara orang tua tenang membaca. Perpustakaan yang menyatu dengan rekreasi akan lebih inklusif,” tambahnya.

Fathoni menegaskan, membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal membangun pikiran warganya. “Inilah investasi jangka panjang. Karena membangun kota bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun pikiran warganya,” katanya.

“Upaya melawan hoaks adalah bagian dari perintah agama. Kebohongan yang diulang-ulang bisa diyakini sebagai kebenaran. Karena itu, literasi digital harus hidup di masyarakat, bukan sekadar di ruang kelas,” pungkasnya. (adv,ama/dya)